



**PERJANJIAN KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
SEKOLAH INDONESIA RIYADH  
TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PELATIHAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN INTERNASIONAL**

Nomor: 20.5.170/UN32.4.5.3/KS/2024

Nomor: 231/SIR/PKMLN/2024

Pada hari ini Senin, 20 Mei 2024 bertempat di Sekolah Indonesia Riyadh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si;** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mustajib Amaq Sudeni, S.Pd., M.Pd.:** Kepala Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Riyadh, yang berkedudukan di 7488 Suwaid Ibn Hubairah, Umm Al Hamam Al Gharbi, Riyadh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan pengelolaannya merupakan kerjasama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Komite Sekolah yang resmi didirikan pada tanggal 02 Oktober 1985 yang sudah memperoleh izin operasional dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
2. Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) merupakan International Indonesian School Institusi Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan pengelolaannya merupakan kerjasama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Komite Sekolah yang sudah memperoleh izin operasional dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia
3. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program dalam perjanjian kerjasama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini melibatkan 1) Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab Roúfah Inayati, S.Pd.,M.Pd; 2) Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) dengan penanggung jawab Dian Eka Prasastianta, M.Pd.; meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Kegiatan Magang mahasiswa
- b. Pembinaan lomba
- c. Narasumber Peningkatan Kompetensi; dan
- d. Teaching Collaboration

### **2. Bidang Penelitian**

- a. Kerjasama Pelaksanaan Penelitian
- b. Kerjasama penulisan artikel bersama.

### **3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru; dan
- b. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Kepala Sekolah.
- c. Kolaborasi dalam pembahasan dan peningkatan kualitas kurikulum

### **PASAL 3 TUJUAN**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Indonesia Riyadh (SIR) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk masa 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan disajikan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si  
Jabatan : Dekan  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 0341) 552888 id  
Surel : [dekan.fe@um.ac.id](mailto:dekan.fe@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

**SEKOLAH INDONESIA RIYADH (SIR)**

Nama : Mustajib Amaq Sudeni, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah Indonesia Riyadh (SIR), Arab Saudi  
Alamat : 7488 Suwaid Ibn Hubairah, Umm Al Hamam Al Gharbi, Riyadh  
Telepon : +966 50 672 6784  
Surel : [siln.riyadh@kemdikbud.go.id](mailto:siln.riyadh@kemdikbud.go.id)

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


3. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerjasama, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA **PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
2. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**20 Mei, 2024**

**PIHAK KESATU,**



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang

**PIHAK KEDUA,**



**Mustajib Amaq Sudeni, S.Pd., M.Pd.**  
Kepala Sekolah Indonesia Riyadh (SIR)  
Arab Saudi

